TRIBUN PONTIANAK

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des

2019 Hal.: 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Transparan Kelola Uang Rakyat

Gubernur Kalbar Sutarmidji sukses melakukan efisiensi APBD 2019 sebanyak Rp 104 miliar. Angka yang bukan main-main tersebut tentu saja fantastis. Darimana saja uang sebanyak itu didapatkan. Ternyata satu di antara cara yang dilakukan Gubernur Sutarmidji adalah memangkas biaya perjalanan dinas pejabat daerah.

Dampak dari pemangkasan uang perjalanan dinas tersebut, Pemprov Kalbar bisa menggratiskan sekolah pada jenjang SMA. Terkait hal tersebut Sutarmidji juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalbar mengubah mindset bahwa perjalanan dinas bukanlah bagian dari penghasilan tambahan atau *can tepi* dalam bahasa Pontianak. Sebab, diakui Sutarmidji ada sejumlah kepala dinas yang menjadikan perjalanan dinas sebagai *can tepi.* Ada pula sebagian ASN masih berpikiran saat perjalanan dinas adalah bagian dari penghasilan tambahan. Padahal kata Sutarmidji, bukan demikian, yang sebenarnya terjadi perjalanan dinas tidak menguntungkan dan menambah pendapatan. Kecuali perjalanan dinas fiktif. Apabila perjalanan dinas yang betul-betul melakukan tugas dan fungsinya pasti rugi bukan malah untung. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk mengubah *mainset* terkait perjalanan dinas menambah penghasilan.

Sutarmidji mengatakan dari APBD 2019 yang disahkan pada awal ia dilantik sebagai Gubernur Kalbar akhir 2018 lalu, penghematan perjalanan dinas di Kalbar sudah Rp 104 miliar. Uang tersebut kemudian dialihkan pada pembiayaan pendidikan SMA. Tahun ini, bahkan dia kembali akan melakukan penghematan biaya perjalanan dinas mencapai Rp 40 miliar sampai akhir tahun.

Sebelumnya menurut BPKPD, perjalanan dinas di Provinsi Kalbar selama setahun mencapai Rp 244 miliar. Dari jumlah itu, Sutarmidji kemudian meminta dijadikan Rp 140 miliar, dan sisanya sebanyak Rp 104 miliar dialokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri. Setelah Rp 104 miliar dialokasikan untuk biaya SMA-SMK negeri, Midji kembali bertanya pada Kadisdikbud, Suprianus Herman apakah masih ada sisa anggaran Rp 104 miliar itu. Kala itu Suprianus Herman menjawab masih. Midji langsung minta agar sisa anggaran dibelikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.

Pengamat Kebijakan Pemerintah FISIP Untan, Dr Erdi Abidin, menilai langkah yang diambil Sutarmidji sudah sangat tepat. Langkah tersebut patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kebijakan yang dilakukan Gubernur Kalbar, itu sudah tepat. Jadi Pemerintahan itukan tidak bisa menambah dan mengurangi tapi dia bisa melakukan efisiensi dan itu telah dijalankan Gubernur Sutarmidji.

Sutarmidji bisa melakukan efisiensi pada satu mata anggaran saja yaitu biaya perjalanan dinas, dampaknya luar biasa besar bagi masyarakat. Saat biaya perjalanan dinas diefisiensikan maka anggarannya dialihkan Sutarmidji pada program yang lebih bermanfaat bagi khalayak ramai.

Kita bisa bayangkan, kalau anggaran itu digunakan semuanya untuk perjalanan dinas, apa ukuran keberhasilannya dan dampaknya? Kita belum bisa melihat dan merasakannya. Tapi berbeda ketika Sutarmidji mengalihkan anggarannya untuk biaya pendidikan gratis, maka puluhan ribu anak-anak SMA dan SMK negeri mendapatkan manfaatnya.

Langkah Sutarmidji yang melakukan efesiensi perjalanan dinas diharapkan juga dilakukan para bupati/wali kota se-Kalbar. Termasuklah para kepala dinas. Jangan sampai uang rakyat hanya habis untuk perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan lain yang tak ada manfaatnya. Selain itu kita juga berharap DPRD baik DPRD Kalbar dan DPRD Kabupaten/Kota menjalankan fungsinya pengawasan dan budgeting-nya dengan maksimal. Kita ingin ada anggota DPRD di daerah ini yang sekencang anggota DPRD dari PSI di Jakarta yang bersuara lantang soal anggaran. Semoga...(*)